

**PENGARUH KEMANDIRIAN FISKAL DAN BELANJA MODAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2015**

(Skripsi)

Oleh

Habibillah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

INFLUENCE OF FISCAL AND CAPITAL GOVERNMENT TO THE ECONOMIC GROWTH OF DISTRICT/CITY SE-PROVINCE LAMPUNG 2011-2015

By

Habibillah

This study aims to analyze and assess empirically the level of regional fiscal independence through Ratio PAD, DAU, DAK and Capital Expenditure Ratio related to its influence on economic growth. The sample in this study consists of 14 districts/cities throughout Lampung Province in 2011-2015. Data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and Central Bureau of Statistics (BPS). The analysis used linear regression analysis with election result using *Random Effect Model*. The result of the research shows that t-statistic test based on regression analysis using *P-value* with significant 5% indicates PAD Ratio, positive and significant DAU, growth of Financial Ratio and Capital Expenditure Ratio is not significant to economic growth in 14 regencies/cities in Lampung Province. In addition, based on Individual *Random Effect* Characteristics in each district/city shows different figures, this is related to the revenue and expenditure objectives in each district/city to economic growth in 14 districts/cities in Lampung Province.

Keywords: Fiscal Independence, Local Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Economic Growth.

ABSTRAK

PENGARUH KEMANDIRIAN FISKAL DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2015

Oleh

Habibillah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui secara empiris tingkat kemandirian fiskal daerah melalui Rasio PAD, DAU, DAK dan Rasio Belanja Modal yang dihubungkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada Tahun 2011-2015. Data yang diperoleh berasal dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis menggunakan analisis regresi linier dengan hasil pemilihan menggunakan *Random Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan Uji t-statistik berdasarkan analisis regresi menggunakan besarnya nilai *P-value* dengan signifikan 5% menunjukkan bahwa Rasio PAD, DAU positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan Rasio DAK, dan Rasio Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Selain itu, berdasarkan nilai Karakteristik Individu *Random Effect* dimasing-masing kabupaten/kota menunjukkan angka yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan belanja daerah di setiap kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi di 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Kata Kunci : Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pertumbuhan Ekonomi.

**PENGARUH KEMANDIRIAN FISKAL DAN BELANJA MODAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2015**

Oleh

Habibillah

Skripsi

Sebagai Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

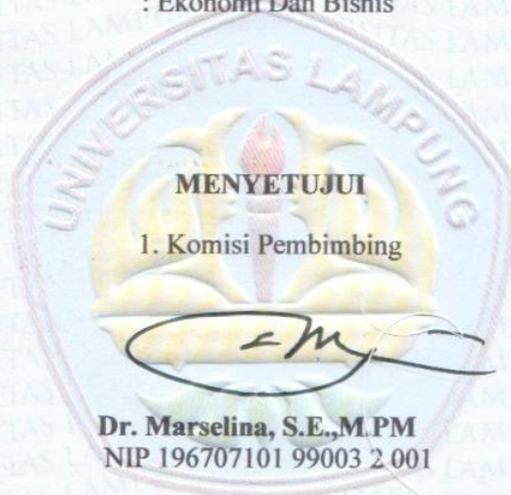
Judul Skripsi : PENGARUH KEMANDIRIAN FISKAL DAN
BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2011-2015

Nama Mahasiswa : Habibillah

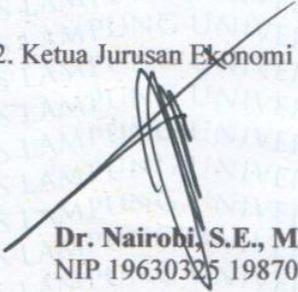
Nomor Pokok Mahasiswa : 1211021056

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis



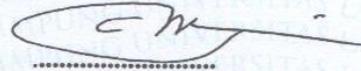
2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19630325 198703 2 001

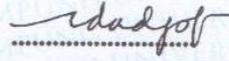
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

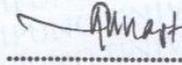
Ketua : Dr. Marselina, S.E.,M.PM.



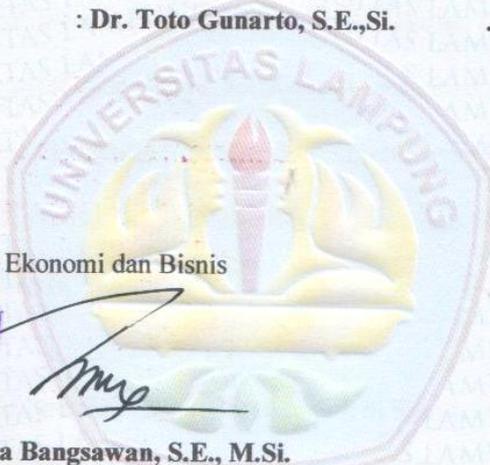
Penguji I : Dr. Ida Budiarty, S.E.,Si.



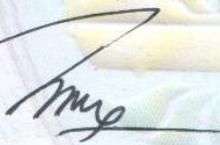
Penguji II : Dr. Toto Gunarto, S.E.,Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Oktober 2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku”.

Bandar Lampung, 05 Oktober 2017

Penulis



Habibillah

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 22 Oktober 1992, sebagai anak ke dua dari empat bersaudara, dari Bapak Khamsin dan Ibu Hamdiah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Nusa Indah Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Barat 1999, Sekolah Dasar (SD) SDN 01 Pulung Kencana sampai tahun 2002, selanjutnya memutuskan pindah ke SD Minurul Iman Pulung Kencana tahun 2005, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 04 Pulung Kencana pada tahun 2008, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di PGRI 01 Daya Murni Tumijajar pada tahun 2011.

Tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui UML. Pada tahun 2014 penulis melakukan Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) ke Otoritas Jasa Keuangan, Bappenas, dan Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan. Pada Januari 2016 Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Karang Mulya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

MOTTO

Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra'ad: 11)

Kebaikan itu memang tak selalu harus berbentuk sesuatu yang terlihat.

(Tere Liye, Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin)

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

(Andrew Jackson)

Kau tahu, Nak, sepotong intan terbaik dihasilkan dari dua hal, yaitu, suhu dan tekanan yang tinggi di perut bumi. Semakin tinggi suhu yang diterimanya, semakin tinggi tekanan yang diperolehnya, maka jika dia bisa bertahan, tidak hancur, dia justeru berubah menjadi intan yang berkilau tiada tara.

(Tere Liye, Keras.Kokoh. Mahal harganya)

Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain.

(Thomas Hardy)

Sesuatu yang ragu-ragu dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

(Habibillah)

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk:

Bapakku H. M. Khamsin, dan Hj. Ibuku Hamdiah yang selalu melimpahkan kasih sayangnya dan selalu berdo'a untuk anak-anaknya. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan serta kesabarannya, semoga Allah selalu melindungi. Amin.

Kakakku Edi Hartono dan Adik-adikku Siti Mutmainah, dan Agustia Arahmah semoga menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, serta dapat meraih cita-cita yang di inginkan, dan tidak lupa bermanfaat bagi banyak orang.

Almamater tercinta jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil' alamin, puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat serta kekuatan kepada Penulis. Sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Beliaulah suri tauladan dalam menjalankan segala aktivitas dalam kehidupan ini.

Dengan berbekal keyakinan, ketabahan, kemauan, kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, dan juga ridho dari Allah SWT akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Kemandirian Fiskal dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi di Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh penulis mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila;

2. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si. sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila;
3. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pelajaran, motivasi dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis.
4. Ibu Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji yang memberikan nasihat maupun masukan dan saran yang bermanfaat.
5. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji yang memberikan masukan dan saran yang bermanfaat.
6. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, dan selaku Pembimbing Akademik;
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan;
8. Ayah dan Ibu tercinta, H.M. Khamsin dan Hj. Hamdiah. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, bimbingan, dan doanya selama ini.
9. Kakaku Edi Hartono terimakasih atas dukungan, serta nasehat dan perhatian yang diberikan untuk terus bisa berjuang menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik-adikku Mutmainah dan Agus Tia Arahmah. Terimakasih atas dukungan, semangat untuk terus berjuang.
11. Sahabat-sahabat satu Konsentrasi Ekonomi Publik. Singgih, Mamet, Paul, Kholifah, Ewil, Nuryani, Dwi sarasati, Richa, Emia sri, Dewi, Putri, Hanum, dll. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya.

12. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2012, Frendy Satrio, Adi, Faisal Twuska, Efran Marbun, Budi Santoso, Rahmat Armansyah, Paul Boyak, Suryanto, Deni Firnando, Lorentina Nainggolan, Agus Maryatul, Dewi Rizkiana, Siti, Intan Larasati, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Kakak-kakak tingkat Ekonomi Pembangunan 2011 yang telah membantu. Julkarnain, Varis, Fadil, Ade dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Sahabat-sahabatku di kampung Jhonhot Manalu, Ghojali, Arya, Adang, Novi Yanto, Arif dkk, Erwan, Agung dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Staf FEB dan EP yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak. Semoga segala dukungan, bimbingan, maupun do'a yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 05 Oktober 2017

Penulis,

Habibillah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	48
C. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	50
D. Hipotesis.....	53
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sumber Data.....	54
B. Definisi Operasional Varabel.....	55
C. Medel dan Metode Analisis.....	58
D. Prosedur Analisis Data.....	59
1. Regresi Data Panel.....	59
1.1. Pendekatan <i>Common Effect</i>	60
1.2. Pendekatan <i>Fixed Effect</i>	60
1.3. Pendekatan <i>Random Effect</i>	61
2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel.....	62
2.1. Uji Chow.....	63
2.2. Uji Hausman.....	63
3. Uji Asumsi Klasik.....	64
3.1. Uji Multikolinearitas.....	65
E. Uji Hipotesis.....	66
1. Uji t- Statistik.....	66
2. Uji F-Statistik.....	68
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	69

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Deskriptif	70
1. Kemandirian Fiskal Melalui Proxi Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2011-2015	70
2. Rasio Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Total Pendapatan Daerah di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2011-2015	74
3. Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Total Pendapatan Daerah di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2011-2015	77
4. Rasio Belanja Modal (BM) terhadap Total Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2011-2015	81
B. Hasil Uji Regresi Data Panel	84
1. Uji Penelitian Model	84
1.1. Uji Chow	84
1.2. Uji Hausman	85
2. Hasil Estimasi Regresi	86
C. Hasil Pengujian Asumsi Klasik	86
1. Uji Heteroskedastisitas	87
2. Pengujian Hipotesis	88
2.1. Hasil Uji t- Statistik	88
2.2. Hasil Uji F- Statistik	89
2.3. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	90
D. Pembahasan dan Hasil	90
1. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah dan hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi	90
2. Rasio Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Total Pendapatan Daerah dan hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi	92
3. Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Total Pendapatan Daerah dan hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi	93
4. Rasio Belanja Modal (BM) terhadap Total Belanja Daerah dan hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi	94
5. Karakteristik Individu Variabel	95
V. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pertumbuhan Ekonomi di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (Persen).....	3
2. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (Persen).....	6
3. Rasio Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (Persen).....	9
4. Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (Persen).....	11
5. Rasio Belanja Modal (BM) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (persen).....	15
6. Ringkasan Penelitian Terdahulu	48
7. Nama Variabel, Simbol, Satuan Pengukuran dan Sumber Data.....	52
8. Tingkat Kemandirian Fiskal di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2011-2015	71
9. Tingkat Rasio Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Total Pendapatan Daerah di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2011-2015	75
10. Tingkat Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Total Pendapatan Daerah di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2011-2015	78

11. Tingkat Rasio Belanja Modal (BM) terhadap Total Pendapatan Daerah di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2011-2015	82
12. Hasil Uji Chow.....	85
13. Hasil Uji Hausman	85
14. Hasil Estimasi Data Panel dengan Pendekatan <i>Random Effect</i>	86
15. Hasil Pengujian Heterokedastisitas	87
16. Hasil Estimasi Pengujian t- Statistik.....	88
17. Pengujian F-Statistik	89
18. Nilai Karakteristik Individu <i>Random Effect</i> (Cross).....	95
19. Nilai Karakteristik Individu <i>Random Effect</i> (Cross) 3 (tiga) kabupaten/kota Provinsi Lampung.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perpotongan Keynesian, pergeseran ke atas dalam pengeluaran pemerintah yang direncanakan sebesar ΔG meningkatkan output sebesar $\Delta G/(1-MPC)$	21
2. Perkembangan pengeluaran pemerintah menurut Rostow-Musgrave dan Peacock-Wiseman.....	23
3. Pertumbuhan pengeluaran menurut Wagner	26
4. Bagan Kerangka Pemikiran.....	50
5. Analisis <i>Trend</i> Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2011-2015	72
6. Analisis <i>Trend</i> Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan Daerah di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Provinsi Lampung 2011-2015.....	76
7. Analisis <i>Trend</i> Dana Alokasi Khusus terhadap Total Pendapatan di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2011-2015	79
8. Analisis <i>Trend</i> Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 2011-2015	83
9. Nilai pertumbuhan ekonomi 3 (tiga) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Nilai Rasio Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Priode 2011-2015	L1
2. Nilai Rasio Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Priode 2011-2015	L2
3. Nilai Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Priode 2011-2015.	L3
4. Nilai Rasio Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Priode 2011-2015.....	L4
5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Priode 2011-2015	L5
6. Hasil Estimasi Model dengan Pendekatan <i>Common Effect</i>	L6
7. Hasil Estimasi Model dengan Pendekatan <i>Fixed Effect</i>	L7
8. Hasil Estimasi Model dengan Pendekatan <i>Random Effect</i>	L8
9. Hasil Pengujian Chow Test Model	L9
10. Hasil Pengujian Hausman	L10
11. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas menggunakan Pengujian Glejser	L11

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan juga merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah proses usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan dalam berorganisasi dan manajemen. Ada empat faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: (1) tanah dan kekayaan alam lainnya (SDA), (2) barang-barang modal dan tingkat

teknologi yang mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dengan kemajuan teknologi, (3) jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan kerja, pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, (4) sistem sosial dan masyarakat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai, seperti: sikap berhemat yang bertujuan untuk melakukan investasi, sikap bekerja keras dsb.

Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Sumatera dari arah Jawa mempunyai potensi besar untuk dikembangkan menjadi wilayah yang lebih produktif. Hal ini ditunjukkan dengan dukungan jumlah penduduk berusia produktif, luas lahan, serta kesuburan tanah untuk lahan pertanian dan perkebunan. Perekonomian Lampung di Sumatera saat ini memiliki peran strategis. Menurut Badan Pusat Statistik tahun (2015) menyebutkan perekonomian Lampung menyumbang kontribusi sebesar 10,0% terhadap perekonomian Sumatera atau peringkat ke-5 setelah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan kemampuan keuangan daerah, dampaknya keuangan daerah akan meningkat jika sektor-sektor ekonomi tumbuh dengan baik. Pertumbuhan ekonomi tercermin dari besarnya persentase kenaikan PDRB Harga Konstan terhadap PDRB Harga Konstan tahun sebelumnya, seperti Tabel 1.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (Persen).

Kabupaten/Kota	TAHUN					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Kab. Lampung Barat	6,67	6,37	6,87	5,59	5,29	6,16
Kab. Lampung Selatan	5,81	5,96	6,76	5,89	5,50	5,98
Kab. Lampung Tengah	6,02	5,95	6,46	5,68	5,38	5,90
Kab. Lampung Utara	5,38	5,64	6,46	5,68	5,38	5,71
Kab. Lampung Timur	5,57	4,24	8,96	2,87	4,60	5,25
Kab. Tanggamus	5,87	9,19	6,41	5,81	5,37	6,53
Kab. Tulang Bawang	5,24	5,29	6,75	5,52	5,02	5,56
Kab. Way Kanan	5,31	5,55	5,28	5,65	5,11	5,38
Kota Bandar Lampung	6,29	6,65	6,90	6,91	6,32	6,61
Kota Metro	6,04	6,69	6,89	6,13	5,85	6,32
Kab. Pesawaran	5,52	5,87	6,20	5,59	5,11	5,66
Kab. Pringsewu	6,20	6,44	6,43	5,74	5,22	6,01
Kab. Mesuji	4,93	5,57	6,18	5,69	5,23	5,52
Kab. Tulang Bawang Barat	5,03	5,75	6,37	5,48	5,35	5,60
Rata-rata PE	5,71	6,31	6,64	5,59	5,34	5,92

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015.

Tabel 1 menunjukkan perubahan pertumbuhan ekonomi di 14 kabupaten/kota Provinsi Lampung selama tahun 2011-2015. Pertumbuhan Ekonomi (PE) dengan nilai rata-rata tertinggi adalah Kota Bandar Lampung sebesar 6,61%, diikuti oleh Kabupaten Tanggamus 6,53%, dan Kota Metro 6,32%. Sedangkan PE yang lebih rendah berada di Kabupaten Lampung Timur sebesar 5,25%, Kabupaten Way Kanan 5,38%, dan Kabupaten Mesuji 5,52%. Berdasarkan pada hal tersebut terlihat bahwa beberapa daerah masih mengalami ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi secara merata, sehingga perlu adanya sumber-sumber keuangan daerah yang memadai atau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adi dan Mumtaz Anwar (2015) mengatakan desentralisasi fiskal berfungsi sebagai teknik penting untuk menyembuhkan kesehatan ekonomi, meningkatkan

efisiensi, pelayanan publik, dan infrastruktur yang lebih baik. Selain itu peran pemerintah daerah juga dapat dilakukan dengan cara peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta adanya retribusi daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah, walaupun dalam penerimaan harus ada peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Otonomi daerah yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 membawa implikasi adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dalam bentuk kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat membentuk kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah atau juga bisa disebut kemandirian fiskal ditandai dengan adanya peningkatan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan teralokasinya belanja dengan tepat sasaran. Selain itu kebijakan desentralisasi fiskal berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal menawarkan sejumlah manfaat bagi tata kelola sektor publik, termasuk pertumbuhan, akuntabilitas, dan daya tanggap pejabat pemerintah terhadap tuntutan dan kebutuhan daerah (Amagoh, 2012). Kasus di Indonesia, Ismail dan Hamzah (2006) menemukan bahwa variabel desentralisasi fiskal berupa indikator pengeluaran pemerintah menunjukkan koefisien positif dan signifikan, sedangkan indikator pendapatan daerah menunjukkan hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara Fadli (2014) menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan juga dapat mengurangi disparitas regional di Indonesia, kekurangannya di bagian timur dan barat Indonesia.

Penelitian Sari, dkk. (2016) membuktikan bahwa dengan menggunakan analisis perbandingan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah sebagai salah satu ukuran kemandirian keuangan daerah menemukan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan tingkat PAD terhadap total pendapatan daerah yang tinggi, maka pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi-potensi PAD tersebut dengan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan. Pengoptimalan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara hasil penelitian Anwar, dkk. (2014) menemukan bahwa kemandirian fiskal yang juga di proxy dengan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi ini dikarenakan rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah.

Ukuran desentralisasi fiskal yang paling mencerminkan efek insentif di tingkat sub-nasional adalah otonomi pendapatan atau porsi belanja pemerintah daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (Freinkman, 2010). Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus memiliki kewenangan untuk memiliki-membiayai layanan yang disediakan secara lokal (Amagoh, 2012). Di sisi lain Provinsi Lampung saat ini tingkat kontribusi PAD terhadap total pembelanjaan daerah sebesar 49,5% ditahun 2015 (DJBK, 2015). Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan dalam pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan juga bahwa di beberapa daerah belum mampu secara mandiri mengelola keuangannya. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi

daerah itu saat ini, maka kepada setiap daerah dituntut atau dapat membiaya diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Menurut Halim (2012) dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan juga perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Makin besarnya sektor maka besar peluang meningkatnya PAD.

Tabel 2. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (Persen).

Kabupaten/Kota	TAHUN					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Kab. Lampung Barat	3,85	3,16	3,30	2,25	2,23	2,96
Kab. Lampung Selatan	6,21	8,74	7,54	7,45	7,39	7,47
Kab. Lampung Tengah	5,32	5,25	5,61	4,37	4,24	4,96
Kab. Lampung Utara	2,42	2,50	3,66	2,09	2,37	2,61
Kab. Lampung Timur	3,15	2,53	3,90	3,43	3,86	3,37
Kab. Tanggamus	2,77	3,83	3,29	2,94	2,86	3,14
Kab. Tulang Bawang	3,51	3,74	4,88	3,55	3,26	3,79
Kab. Way Kanan	3,70	4,42	3,23	4,51	3,48	3,87
Kota Bandar Lampung	19,41	19,66	21,49	21,52	20,97	20,61
Kota Metro	6,43	8,43	11,76	10,56	10,29	9,49
Kab. Pesawaran	2,46	2,37	2,74	2,26	2,96	2,56
Kab. Pringsewu	2,95	3,89	3,21	2,25	3,14	3,09
Kab. Mesuji	0,61	1,14	2,99	3,77	3,44	2,39
Kab. Tulang Bawang Barat	0,54	1,52	1,90	1,15	2,08	1,51
Rata-rata PAD/TPD	4,52	5,08	5,68	5,46	5,18	5,13

Sumber : Data Keuangan Daerah, DJPK. 2015

Tabel 2 menunjukkan rasio perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun

2011-2015. Terlihat bahwa rata-rata Rasio PAD terhadap TPD tertinggi berada di Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung dan secara geografis kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, sehingga memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat, Aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya, dan juga terjadi di kota ini sebagai pusat jalannya roda pemerintahan se-Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki tingkat rasio rata-rata PAD sebesar 20,61% dengan rincian menurut sumbangan terbesar di tahun 2015 berada pada sektor pajak daerah 65%, Retribusi Daerah 11,8%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 2,8%, dan Lain-lain 20,4%. Sedangkan rasio PAD terendah berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan rasio rata-rata 1,15% dengan realisasi penerimaan pada sektor pajak daerah 44,4%, Retribusi Daerah 9,4%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 6,9%, dan Lain-lain 40,3% (BPS, 2015). Rendahnya PAD terhadap TPD di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini terjadi karena baru mengalami pemekaran pada tahun 2008 sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dalam pencapaian belum mampu menciptakan PAD yang tinggi terhadap TPD dalam jangka pendek.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan yang berasal dari pungutan berdasarkan peraturan daerah pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004. PAD sebagai sumber penerimaan daerah perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik agar dapat terus dapat ditingkatkan sehingga mampu menanggung sebagian besar beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang nantinya sebagai menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang setiap tahun

meningkat, sehingga kemampuan dalam berotonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara mandiri dapat dilaksanakan. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam kebijakan yang dengan waktu meningkatkan basis pendapatan waktu tertentu (Amagoh, 2012).

Fenomena umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk di Provinsi Lampung dalam era otonomi di bidang pengelolaan keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat. Sehingga transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan Pusat sangat diharapkan daerah memberikan dan menciptakan kemandirian fiskal daerah. Salah satu jenis transfer pemerintah pusat dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan komponen dari Dana Perimbangan Pusat yang sering disebut sebagai dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antardaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketidakmerataan /ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah yang terjadi saat ini dapat diatasi melalui konsepsi celah fiskal (*fiscal gap*) yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) yang dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup melalui transfer pemerintah pusat. Adanya peningkatan bantuan dari transfer pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum akan membantu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor penerimaan berupa pajak, retribusi daerah, dan dll, yang nantinya digunakan untuk membiayai pembelanjaan daerah dalam menunjang peningkatan fasilitas

infrastruktur maupun pelayanan daerah, sehingga akan lebih menambah/meningkatkan kemandirian keuangan melalui pembangunan fasilitas infrastruktur maupun pelayanan daerah untuk ke depannya. Dengan adanya kemandirian keuangan daerah ini maka belanja daerah akan terpenuhi, sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara mandiri.

Tabel 3. Rasio Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (Persen).

Kabupaten/Kota	TAHUN					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Kab. Lampung Barat	62,14	68,57	66,11	64,14	59,07	64,01
Kab. Lampung Selatan	60,89	66,82	67,98	67,09	59,14	64,38
Kab. Lampung Tengah	65,06	64,72	69,89	63,94	62,36	65,19
Kab. Lampung Utara	66,07	73,59	71,60	70,88	71,72	70,77
Kab. Lampung Timur	68,63	67,77	66,35	63,94	56,72	64,68
Kab. Tanggamus	60,75	63,93	68,90	63,22	59,48	63,26
Kab. Tulang Bawang	62,60	64,59	67,98	66,08	63,25	64,90
Kab. Way Kanan	57,95	63,76	66,02	65,04	63,78	63,31
Kota Bandar Lampung	59,94	56,33	52,68	52,20	43,81	52,99
Kota Metro	67,60	64,77	62,76	62,38	58,23	63,15
Kab. Pesawaran	64,13	76,73	72,63	69,38	63,19	69,21
Kab. Pringsewu	69,51	60,59	64,17	65,18	60,85	64,06
Kab. Mesuji	64,42	73,26	71,65	69,82	61,48	68,13
Kab. Tulang Bawang Barat	62,39	62,06	67,02	70,06	61,37	64,58
Rata-rata DAU/TPD	63,72	66,25	66,84	65,24	60,32	64,47

Sumber : Data Keuangan Daerah, DJPK. 2015

Tabel 3 menunjukkan rata-rata perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung selama tahun 2011-2015 sebesar 64,47%. Terlihat bahwa DAU tertinggi berada di Kabupaten Lampung Utara dengan rata-rata rasio sebesar 70,77%, Kabupaten Pesawaran 69,21%, dan Kabupaten Mesuji 68,13%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan 3 (tiga) kabupaten terhadap penerimaan dana

pemerintah pusat relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya se-Provinsi Lampung, ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD tersebut sangat kurang terhadap pemenuhan kebutuhan daerah pembangunan dan pelayanan publik, sehingga dibutuhkan pendanaan yang berasal dari DAU sebagai sumber pendapatan daerah. Penelitian Dewi (2017) menyatakan DAU pada prinsipnya mengatasi ketimpangan infrastruktur yang ada pada setiap daerah, serta agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata. Hasil Penelitian Permatasari (2013) dan Paseki (2016) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini disebabkan peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Sebaliknya penelitian Tahar (2011) menyatakan DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan melalui sarana prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi DAU tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga alokasi dana tidak tepat sasaran.

Selain DAU, untuk mendorong kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah perlu upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (DJBK, 2016). Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN. Penggunaannya tidak boleh disalahgunakan untuk kegiatan di luar

ketentuan (Maryati, 2010). Menurut UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan juga kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Pengalokasian DAK digunakan untuk pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik dalam mendukung kelancaran sumber PAD maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik dan tidak termasuk penyertaan modal.

Tabel 4. Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (Persen).

Kabupaten/Kota	TAHUN					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Kab. Lampung Barat	9,14	9,13	10,57	13,54	11,72	10,82
Kab. Lampung Selatan	8,00	11,25	6,81	7,64	6,38	8,02
Kab. Lampung Tengah	8,65	7,38	6,98	4,53	3,71	6,25
Kab. Lampung Utara	7,92	9,01	8,67	7,54	7,25	8,08
Kab. Lampung Timur	6,73	5,52	4,81	4,32	4,89	5,25
Kab. Tanggamus	10,31	10,99	8,16	7,97	7,84	9,05
Kab. Tulang Bawang	12,09	10,35	7,51	10,08	7,57	9,52
Kab. Way Kanan	7,98	9,85	10,84	9,34	9,23	9,45
Kota Bandar Lampung	3,55	3,73	3,96	3,53	3,20	3,59
Kota Metro	5,79	5,92	6,15	6,13	5,61	5,92
Kab. Pesawaran	11,81	9,19	9,77	8,69	8,49	9,59
Kab. Pringsewu	10,07	12,56	7,39	6,62	6,78	8,68
Kab. Mesuji	11,99	12,00	10,50	9,33	11,13	10,99
Kab. Tulang Bawang Barat	13,36	13,09	9,55	8,33	7,27	10,32
Rata-rata DAK/TPD	9,10	9,28	7,98	7,69	7,22	8,25

Sumber : Data Keuangan Daerah, DJPK. 2015

Tabel 4 menunjukkan rata-rata perkembangan Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung selama tahun 2011-2015 sebesar 8,25%. Terlihat bahwa rasio tertinggi berada di Kabupaten Mesuji dengan besarnya Rasio DAK terhadap TPD sebesar 10,99% dan Kabupaten Lampung Barat 10,82%. Hal ini bahwa 2 (dua) Kabupaten ini mempunyai kebutuhan khusus lebih besar dari pada kabupaten/kota lainnya. Besarnya DAK terhadap TPD dikarenakan Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Barat baru mengalami pemekaran dari kabupaten sebelumnya dan masih banyak membutuhkan pembangunan infrastruktur, sehingga dibutuhkan DAK yang besar dalam memenuhi kebutuhan, seperti: pembangunan jalan di kawasan terpencil, pendidikan, dan lain-lain kebutuhan khusus daerah sesuai dengan prioritas nasional. DAK merupakan transfer dana yang bersifat spesifik, yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (*specific grant*) (Sidik et.al, 2004). Menurut Penelitian Permanasari (2013) menyatakan pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus, dalam hal ini dimaksudkan agar pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Berdasarkan penelitian Maryati (2010), Permanasari (2013), dan Anwar, dkk. (2016) menghasilkan DAK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti: pembangunan jalan di kawasan terpencil, pendidikan, dan lain-lain kebutuhan khusus daerah

sesuai dengan prioritas nasional dengan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan artinya tidak boleh disalahgunakan/digunakan untuk kegiatan di luar ketentuan yang di proritaskan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi selain dipengaruhi oleh kemandirian fiskal, pertumbuhan ekonomi juga diduga dipengaruhi oleh jenis dan besaran alokasi/pengeluaran daerah. pengeluaran daerah merupakan menunjang dan penggerak dari proses pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran daerah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, karena salah satu tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2013).

Nwaoha, dkk. (2017) mengatakan pemerintah seharusnya meningkatkan belanja modal dengan mengalokasikan lebih banyak ke sektor-sektor produktif dari ekonomi. Peningkatan sektor-sektor produktif merupakan prasyarat utama bagi tumbuh kembangnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tercermin pada peningkatan output pendapatan daerah. Lebih dari itu, kontribusi positif dari belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi mengharuskan terus penggunaan instrumen kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan makro ekonomi. Hal ini menunjukkan juga belanja modal merupakan sebagai aset tetap, belanja modal mempunyai dampak langsung terhadap perekonomian suatu wilayah, belanja modal merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Makin

besar pengeluaran pemerintah maka makin pesat pertumbuhan ekonominya. Mardiasmo (2009: 93) menyatakan bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 salah satu jenis/pos tentang standar akuntansi yaitu belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran pada sektor publik untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari lebih dari duabelas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal merupakan jenis pengeluaran yang dominan sebagian besar daerah yang berhubungan erat dengan pembangunan publik. Belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Keseluruhan belanja modal tersebut merupakan infrastruktur yang digunakan oleh daerah. Penelitian Dewi (2017) mengatakan pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap daerah. Pada dasarnya alokasi belanja modal digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk pembangunan. Makin tinggi nilai Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut (BPS, 2015).

Tabel 5. Rasio Belanja Modal (BM) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di 14 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2011-2015 (persen).

Kabupaten/Kota	TAHUN					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Kab. Lampung Barat	21,30	23,04	26,50	24,25	27,89	24,60
Kab. Lampung Selatan	16,81	21,60	17,40	26,43	24,85	21,42
Kab. Lampung Tengah	16,19	17,80	19,02	21,60	15,82	18,09
Kab. Lampung Utara	19,17	20,05	21,48	19,73	22,05	20,50
Kab. Lampung Timur	10,56	14,37	16,14	13,68	13,86	13,72
Kab. Tanggamus	22,73	21,00	26,55	28,41	26,16	24,97
Kab. Tulang Bawang	24,86	25,52	20,33	23,55	23,61	23,57
Kab. Way Kanan	19,44	18,46	21,93	25,19	23,48	21,70
Kota Bandar Lampung	6,39	21,68	23,17	23,84	17,63	18,54
Kota Metro	19,79	17,46	17,35	19,60	20,53	18,95
Kab. Pesawaran	24,47	26,01	34,66	32,67	25,02	28,57
Kab. Pringsewu	18,50	23,51	21,99	19,76	18,07	20,37
Kab. Mesuji	32,92	34,47	31,88	30,70	27,85	31,56
Kab. Tulang Bawang Barat	37,86	32,55	31,98	30,63	30,37	32,68
Rata-rata BM/TBD	20,79	22,68	23,60	24,29	22,66	22,80

Sumber : Data Keuangan Daerah, DJPK. 2015

Tabel 5 menunjukkan rata-rata perkembangan Rasio Belanja Modal (BM) terhadap Total Belanja Daerah (TBD) tiap wilayah di 14 kabupaten/kota Provinsi Lampung sebesar 22,80%. Besarnya Belanja Modal (BM) terhadap Total Belanja Daerah (TBD) tiap tahunnya semakin meningkat positif di beberapa kabupaten dan kota. Kabupaten memiliki Rasio Belanja Modal tertinggi berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 32,24%, sementara Kabupaten Mesuji 32,54%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji sedang melakukan pembangunan infrastruktur yang di danai melalui belanja modal. Tingginya belanja modal terhadap total belanja daerah akan berdampak tingginya pembangunan infrastruktur melalui pembangunan publik meliputi pembelian tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, jalan, irigasi,

dan aset lainnya daerah sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya Dewi (2017) menyatakan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena belanja modal kurang produktif, dan hasil alokasi belanja modal belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek dalam pembangunan infrastruktur.

B. Rumusan Masalah

Kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat membentuk kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah atau juga bisa disebut kemandirian fiskal ditandai dengan adanya peningkatan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan teralokasinya belanja dengan tepat sasaran. Selain peran penting dari kebijakan desentralisasi fiskal dalam bentuk pembiayaan mewujudkan kemandirian fiskal, pemerintah daerah mempunyai peran penting mewujudkan kemandirian fiskal melalui peningkatan pengelolaan secara efektif dan efisien dalam memajemen pengelolaan keuangan dan bentuk belanja. Sehingga kebijakan desentralisasi fiskal bukan hanya membentuk kemandirian keuangan melainkan juga adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah untuk melihat tingkat kemandirian fiskal daerah melalui proxy Rasio PAD, DAU, DAK terhadap total pendapatan daerah dan Rasio Belanja Modal (BM) terhadap total belanja daerah yang dihubungkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat kemandirian fiskal daerah melalui proxy Rasio PAD, DAU, DAK terhadap total pendapatan daerah dan Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Instansi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya meningkatkan kemandirian keuangan/fiskal pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, dan wawasan khususnya mengenai bagaimana tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah dan terkait hubungan pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

3. Peneliti selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran tentang sejauh mana perkembangan kemandirian fiskal pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan jumlah produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut Arsyad (1999: 11), suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP), apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil di dalam negara/wilayah tersebut.

Menurut Sukirno (1996: 33) pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yang lebih tentu membaik yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil

melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan dalam berorganisasi, dan manajemen.

Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional (PDRB), baik atas Harga Berlaku atau atas Dasar Harga Konstan. PDRB menurut Sukirno (2004: 17), didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi berbentuk Produk Domestik Regional Bruto/PDRB diukur berdasarkan PDRB Harga Konstan dengan rumus sebagai berikut:

$$PE_t = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- PE_t = Pertumbuhan Ekonomi t (triwulan atau tahunan)
- PDRB_t = Produk Domestik Bruto Priode t (berdasarkan harga konstan)
- PDRB_{t-1} = Produk Domestik Bruto Priode sebelumnya

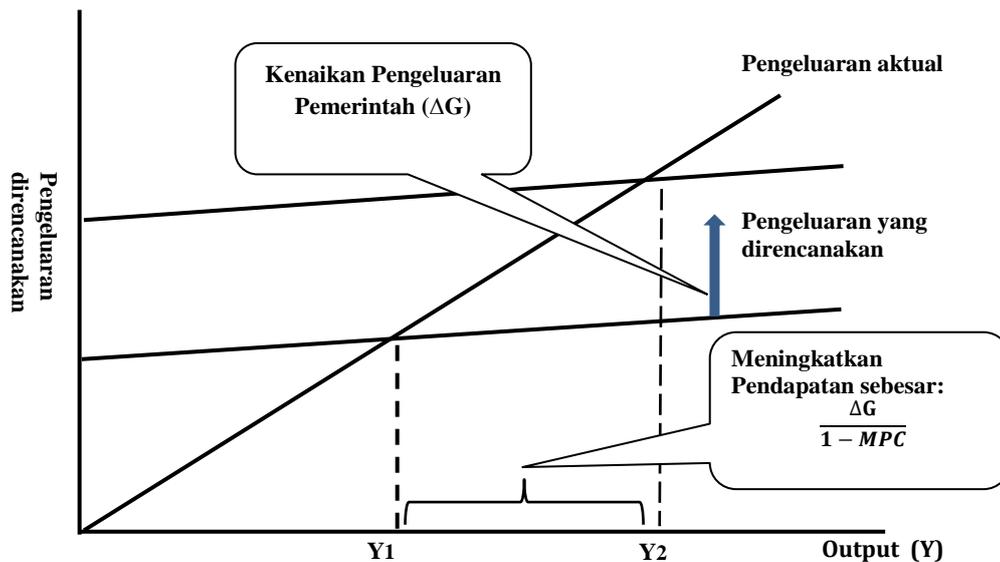
2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan oleh keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Strategi yang disarankan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan kebijakan publik yang ditujukan untuk menyediakan pelayanan publik disegala bidang (Case dan Fair, 2007: 322). Berikut ini teori-teori yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah:

2.1 Teori Pertumbuhan Keynes

Pengeluaran Pemerintah menurut Versi Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1997).

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam mengatur pengeluarannya. Disamping itu pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta. Menurut teori Keynesian dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) yang membahas mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dari kenaikan output pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek, sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Untuk memodelkan pandangan Keynesian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ini diilustrasikan dengan pemodelan yang disebut perpotongan Keynesian (Mankiw, 2007: 277), pada Gambar 1.



Gambar 1. Perpotongan Keynesian, pergeseran ke atas dalam pengeluaran pemerintah yang direncanakan sebesar ΔG meningkatkan output sebesar $\Delta G/(1-MPC)$

Besarnya kenaikan output sebagai dampak dari kenaikan pengeluaran pemerintah disebut pengganda pembelian pemerintah (*Government purchases multiplier*) yang diukur dengan rasio $\Delta Y/\Delta G$. Implikasi dari perpotongan Keynesian adalah bahwa kenaikan output (ΔY) lebih besar dari kenaikan pengeluaran pemerintah (ΔG), hal ini disebabkan karena adanya efek berantai yang ditimbulkan dari peningkatan pengeluaran pemerintah. Proses ini bermula dari perubahan awal pengeluaran pemerintah sebesar ΔG meningkatkan output ΔY sebesar ΔG , peningkatan output atau pendapatan ini selanjutnya meningkatkan konsumsi masyarakat sebesar $MPC \times \Delta G$, di mana MPC (*Marginal Propensity to Consume*) adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan dalam pendapatan yang kedua ini sekali lagi meningkatkan konsumsi sekarang sebesar $MPC \times (MPC \times \Delta G)$ yang sekali lagi meningkatkan pengeluaran serta pendapatan, dan seterusnya. Umpan-balik dan konsumsi ke pendapatan ke konsumsi ini terus-menerus terjadi. Pengaruh totalnya terhadap pendapatan adalah:

Perubahan awal dalam belanja pemerintah	=	ΔG
Perubahan pertama dalam konsumsi	=	$MPC \times \Delta G$
Perubahan kedua dalam konsumsi	=	$MPC^2 \times \Delta G$
Perubahan ketiga dalam konsumsi	=	$MPC^3 \times \Delta G$
		•
		•
		•

$$\Delta Y = (1 + MPC + MPC^2 + MPC^3 + \dots) \Delta G$$

Pengganda belanja pemerintah adalah:

$$\frac{\Delta y}{\Delta G} = 1 + MPC + MPC^2 + MPC^3 + \dots$$

Persamaan untuk mengganda dari segi geometri tidak terhingga (*infinite geometric series*). Hasil dari aljabar membolehkan mengganda sebagai berikut:

$$\frac{\Delta y}{\Delta G} = \frac{1}{(1 - MPC)}$$

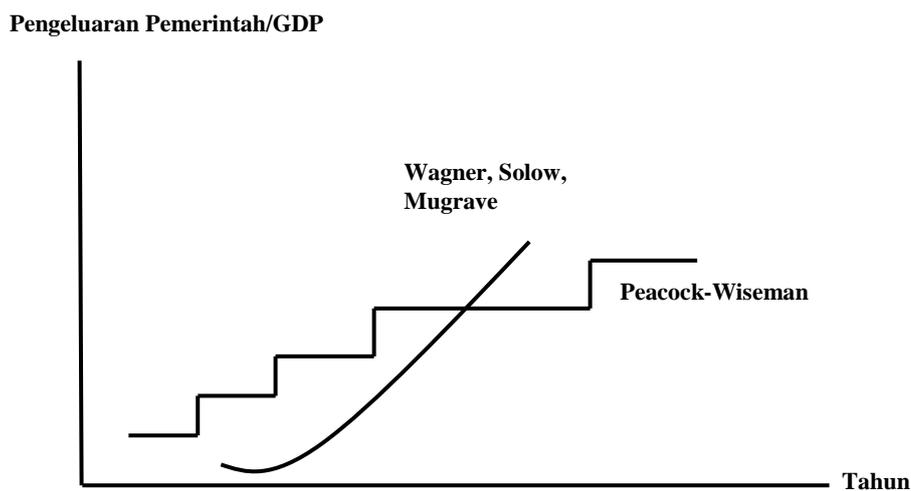
Misalnya, jika kecenderungan mengkonsumsi marjinal adalah 0,6 penggandanya adalah:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta G} &= 1 + 0,6 + 0,6^2 + 0,6^2 + \dots \\ &= 1 / (1 - 0,6) \\ &= 2,5 \end{aligned}$$

Dalam hal ini, kenaikan sebesar 1 dalam belanja pemerintah meningkatkan pendapatan ekuilibrium sebesar \$2,5 (Mankiw, 2007: 279). Hal ini menunjukkan kenaikan pengeluaran pemerintah menaikkan output sebagai dampak dari kenaikan pengeluaran pemerintah yang disebut pengganda, dengan ada kenaikan output maka menaikkan pertumbuhan ekonomi, ini dikarenakan kenaikan output merupakan indikator pertumbuhan ekonomi.

2.2 Teori Rostow dan Musgrave

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesoebroto, 2001). Tahapan pembangunan ekonomi menurut Rostow dijelaskan dalam bentuk kurva yang eksponensial, seperti Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan pengeluaran pemerintah menurut Rostow-Musgrave dan Peacock-Wiseman

Sumber: Dumairy, 1997: 164.

Rostow bersama Musgrave mengembangkan model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini menghubungkan antara pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan yang dikembangkan oleh Rostow. Model pembangunan oleh Rostow dan Musgrave membagi pengeluaran pemerintah dalam 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut pembangunan (Dumairy, 1997: 163). Tahap awal perkembangan ekonomi suatu daerah, investasi publik oleh pemerintah akan lebih besar dibandingkan investasi swasta. Investasi pemerintah terfokus kepada pengeluaran publik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran publik tersebut berupa penyediaan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi (Prasetya, 2012: 6).

2.3 Hukum Wagner

Teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Wagner menyatakan jika pendapatan per kapita mengalami kenaikan maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan mengalami kenaikan (Dumairy, 1997: 161). Tumbuhnya perekonomian akan menyebabkan rumitnya hubungan industri dengan industri, industri dengan masyarakat, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut kenaikan pengeluaran pemerintah disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, dan sebagainya (Mangkoesebroto, 1995: 171). Hukum tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PkPP}{PPk} > \frac{PkPP_{t-1}}{PPk_{t-1}} > \frac{PkPP_{t-2}}{PPk_{t-2}} > \dots > \frac{PkPP_{t-n}}{PPk_{t-n}}$$

Keterangan:

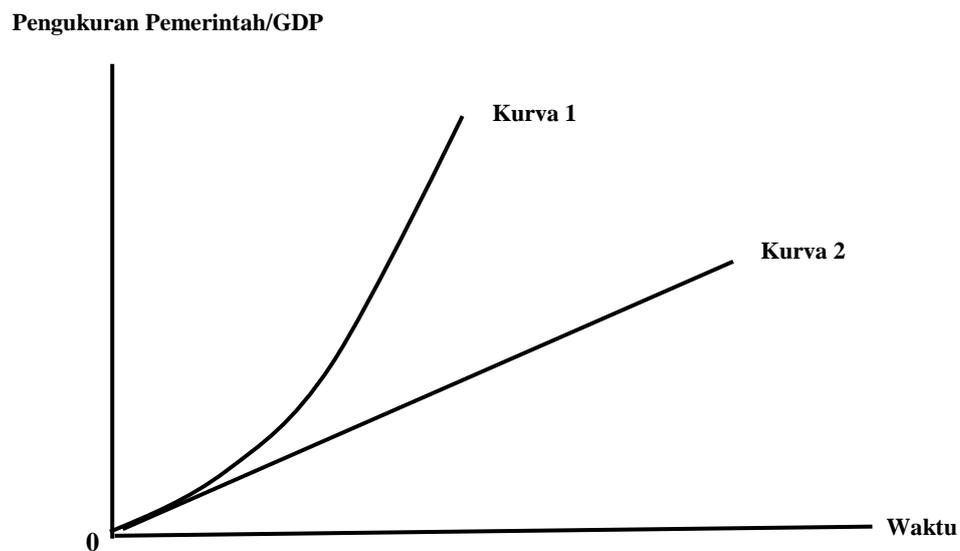
PkPP = Pengeluaran Pemerintah per kapita

PPk = Pendapatan Nasional per kapita

1,2...n = Indeks Waktu (tahun)

Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dengan masyarakat yang lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu: tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demografi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah (Dumairy, 1997).

Pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan hubungan antara industri-industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif menjadi semakin besar. Namun hukum Wagner terdapat kelemahan yaitu tidak didasar pada suatu teori pemilihan barang-barang publik. Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam Gambar 3, dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh Gambar 3.



Gambar 3. Pertumbuhan pengeluaran menurut Wagner

Sumber : Dumairy, 1997

2.4 Teori Peacock dan Wiseman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah akan selalu berusaha memperbesar pengeluaran pemerintah melalui peningkatan pendapatan pemerintah berupa pajak. Hal ini menunjukkan bahwa naiknya pendapatan pemerintah akan diikuti naiknya pengeluaran pemerintah. Masyarakat akan bersedia membayar pajak pada tingkatan tertentu. Hal ini disebabkan karena masyarakat sadar perlunya pemungutan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Idris, 2016: 37). Toleransi pajak oleh masyarakat sebesar 25% dari pendapatan nasional/GNP (Mangkoesoebroto, 1995: 176).

Pada kondisi normal, ketika GNP mengalami kenaikan akan menyebabkan kenaikan pada pendapatan pemerintah yang diikuti naiknya pengeluaran pemerintah. Terganggunya kondisi normal tersebut, misal karena adanya gangguan sosial maka aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pajak

tidak akan cukup untuk mengatasi gangguan sosial sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Selanjutnya, muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa hal yang menyebabkan kenaikan pada pengeluaran pemerintah tidak hanya naiknya GNP tetapi juga utang dan bunga (Prasetya, 2012: 8).

3. Otonomi Daerah

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 6, mendefenisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2009) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota menjalankan otonomi daerah dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

1) Kewenangan Otonomi Luas.

Kewenangan otonomi luas adalah memberikan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping

itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

2) Otonomi Nyata.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu, yang secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

3) Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 8,9,10,11 tentang pemerintah daerah ada 4 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu:

- 1) Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- 3) Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
- 4) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

4. Desentralisasi Fiskal

Menurut Halim (2007), desentralisasi fiskal sesuai UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat

Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*). Dengan kata lain, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan (Saragih, 2003: 45).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal harus didukung dengan Dana Perimbangan. Dengan kata lain Dana Perimbangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dalam Dana Perimbangan terdapat tiga komponen penting yang mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam proses implementasi otonomi daerah yaitu Dana Bagi Hasil yang berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. Sedangkan fungsi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai pemerataan fiskal antardaerah di Indonesia. Fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai kebijakan yang bersifat darurat (Saragih, 2003: 60).

Menurut Robert Simanjuntak (2002), sasaran desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum adalah:

- 1) Untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan daerah;
- 2) Mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintah daerah;
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah;
- 4) Mengurangi ketimpangan antardaerah;
- 5) Menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah;
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

5. Keuangan Daerah

Keuangan daerah memegang peranan penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif dan efisien. Keuangan daerah menurut Mamesh (dalam Halim, 2012) dinyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua

hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Halim (2007), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD. Berkaitan dengan hal tersebut maka berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Pengertian keuangan daerah menurut penjelasan Umum Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sebagaimana keuangan negara, keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang

dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang inventaris milik daerah, sedangkan yang termasuk dalam keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

6. Anggaran Pemerintah Sektor Publik

Anggaran dalam sektor publik sering kali juga disebut dengan anggaran publik yang merujuk pada anggaran pemerintah, dikarenakan organisasi pemerintah merupakan organisasi dalam sektor publik yang domainnya paling luas (lihat Mardiasmo, 2009; dan telah dijelaskan juga oleh Halim dan Kusufi, 2012). Menurut Freeman (2003) dalam Nordiawan (2006), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the proses of allocating resources to unlimited demands*). Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2009). Anggaran publik terwujud dalam APBN dan APBD. APBN merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan APBD, analog dengan kedudukan APBN dalam keuangan negara, merupakan

ruang lingkup keuangan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 2012). APBN dan APBD merupakan inti dari keuangan pemerintahan karena anggaran merupakan informasi keuangan paling penting yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam keuangan pemerintahan menjadi penting (Halim dan Kusufi, 2012). Mardiasmo (2009) menyebutkan bahwa anggaran sektor publik adalah anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Mardiasmo (2009) mengungkapkan pentingnya anggaran sektor publik karena beberapa alasan berikut:

- 1) Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity Of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.
- 3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk merancang semua program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan sehingga setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik. Anggaran sektor publik menjadi kendali dan tolok ukur setiap aktivitas yang dilakukan melalui APBD daerah.

7. Kemandirian Fiskal

Halim dan Kusufi (2014) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian berbentuk rasio keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Secara konseptual ada 4 pola hubungan yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah yaitu (Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim, 2004):

- 1) Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio 0%-10%.
- 2) Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sudah lebih mampu melaksanakan otonomi dengan rasio 10%-20%.

- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi dengan rasio 20%-30%.
- 4) Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah 30%-40%.

8. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah kabupaten dan kota perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional. Menurut Halim dan Kusufi (2014: 101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Mardiasmo (2002: 132), menyatakan pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri:

- 1) Pajak Daerah, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dalam pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

- 2) Retribusi Daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran/jasa/pemberian ijin tertentu yang khusus diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
- 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah, merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN;
 - bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:
 - Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan;
 - Jasa giro;
 - Pendapatan bunga;
 - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

- penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
- Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- Pendapatan denda pajak;
- Pendapatan denda retribusi;
- Pendapatan eksekusi atas jaminan;
- Pendapatan dari pengembalian;
- Fasilitas sosial dan umum;
- Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

9. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam Negeri Neto. DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang penerapan formula

yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah.

Menurut Saragih (2003: 98), kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (*intergovernmental transfer*) berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan daerah.

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN;
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas;
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota;
- 4) Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar

tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

10. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut Sidik et. al (2004), DAK merupakan transfer dana yang bersifat spesifik, yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (*specific grant*). Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Hal yang dimaksud dengan fungsi dalam rincian belanja negara antara lain terdiri atas layanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. DAK merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah kabupaten/kota untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus, tergantung tersedianya dana dalam APBN (Suparmoko, 2002: 43).

Menurut UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004, wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK, karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

- 1) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
- 2) Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah;
- 3) Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu

- 1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
- 2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

11. Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Menurut Halim (2004: 73) belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Belanja Modal dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terdiri 5 (lima) jenis dikategori utama, dengan diantaranya adalah:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian balik nama, sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan /pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli,

pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Kriteria Belanja Modal

Belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

- 1) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.
- 2) Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut : berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik aset lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.
- 3) Kriteria kapitalisasi aset tetap, diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pejabat/aparat penyusun anggaran dan / penyusun laporan keuangan pemerintah mempunyai pedoman dalam penetapan belanja modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah.

12. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar mampu menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006). Menurut Saragih (2003) peningkatan PAD merupakan dampak pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD dan sebaliknya. Hal ini diperkuat dalam penelitian sebelumnya Maryati (2010) dan Anwar, dkk. (2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi.

13. Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Untuk mengurangi ketimpangan dalam

kebutuhan pembiayaan, penguasaan pajak, dan retribusi antara pusat dan daerah dapat diatasi dengan adanya Dana Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari penerimaan dalam Negeri). Dengan Dana Perimbangan tersebut, khususnya dari Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan yang nantinya akan membantu dalam proses pembiayaan, selain Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dalam terwujudnya tingkat kemandirian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan apabila terjadi peningkatan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil didalam negara/wilayah tersebut. Menurut Sadono Sukirno (1996: 33) pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan merupakan fungsi dari Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran pemerintah daerah dalam mencapai peningkatan pemerataan, memacu tingkat potensi-potensi daerah dalam menuju kemandirian daerah dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi antardaerah.

14. Hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional dalam untuk membiayai pengeluaran dan menggali potensi daerah tertentu, antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan lain-lain. walaupun demikian tidak semua daerah mendapatkan besarnya DAK, ini dikarenakan kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis di susun oleh menteri teknis terkait dalam bentuk indikator-indikator kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK. Dalam hal kegiatan yang di danai dengan DAK adalah kegiatan yang bersifat kegiatan fisik, maka daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari DAK yang diterima.

Indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dapat dirasakan dan memacu aktivitas perekonomian domestik yang dapat dinilai efektifitasnya. Dalam pengalokasiana Dana Alokasi Khusus digunakan untuk pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Hal ini akan berdampak pada peningkatan sumber Pendapatan

Asli Daerah untuk jangka panjang dalam tersediannya sarana dan prasarana khusus dalam penunjang meningkatkan tingkat kemandirian daerah.

15. Hubungan antara Belanja Modal (BM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Belanja modal dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Belanja Publik adalah belanja yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat, misalnya: pembangunan jembatan, pembelian mobil ambulan untuk umum dan lain-lain. (2) Belanja Aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan langsung oleh aparatur, seperti: pembangunan gedung dewan, pembelian mobil dinas dan lain-lain.

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui salah satunya anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut di dapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Mardiasmo (2009: 93) menyatakan bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya

mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan. Dengan demikian ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 6. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Analisis
1.	Maryati, Ulfi dan Endrawati (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat	Metode Regresi OLS	PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan positif Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan, tetapi positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi
2.	Tahar, Afrizal dan Maulida Zakhiya (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Metode Regresi OLS	PAD berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Sedangkan analisis PAD, DAU, DAK, dan Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

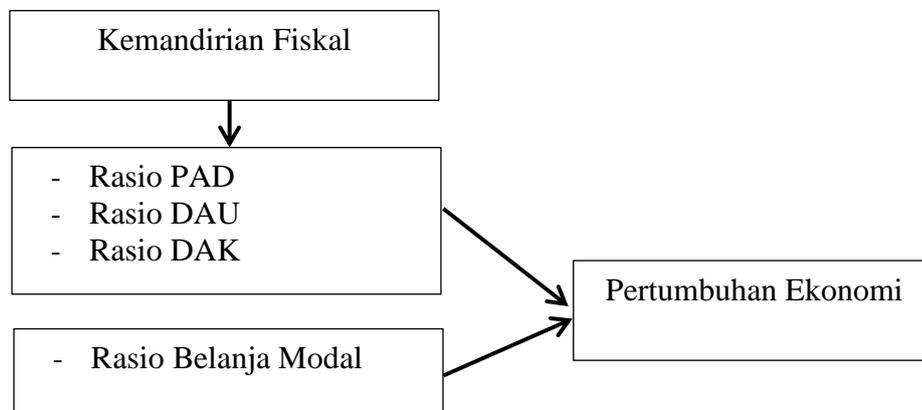
Lanjutan Tabel 6.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Analisis
3.	Permatasari, Winda Amiga (2013)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Metode Regresi OLS	DAU dan PAD mempengaruhi signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan DAU dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
4.	Anwar, Ervina., Anderson K, dan George K (2014)	Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara	Metode Regresi OLS	Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Fiskal Daerah
5.	Sari, Normala Greydi., Paulus Kondangen, dan Tri Oldy Rotinsulu (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014	Metode Regresi Panel	Melalui Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
6.	Anwar, Lukitasari Meilita., Sutomo Wim Palar, dan Jacline I Sumual (2016)	Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013)	Metode Path Analysis	DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan DAK dan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Lanjutan Tabel 6.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Analisis
7.	Dewi, Ni Wayan Ratna., dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Metode Regresi OLS	PAD dan DAK berpengaruh signifikan, tetapi negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan DAU dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

C. Kerangka Pemikiran Empiris



Gambar 4. Bagan Kerangka Pemikiran

Kemandirian fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan seberapa besar peranan pemerintah pusat dalam kemandirian fiskal pemerintah daerah. Kemandirian berbentuk rasio keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

Pada bagan kerangka pemikiran ini dijelaskan adanya hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat yang digambarkan lewat kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan bagaimana kemandirian fiskal daerah melalui proksi Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Dana Alokasi Umum (DAU), Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap total pendapatan daerah dan Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah dengan dihubungkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan lokal khususnya melalui PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu dalam masa desentralisasi seperti ini pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD masing-masing dengan memaksimalkan sumber daya yang diperoleh maupun dimiliki agar mampu membiayai kegiatan atau kebutuhan daerah baik infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Makin meningkat PAD maka akan terciptanya kemandirian daerah, dengan adanya kemandirian daerah maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan. Dalam penelitian Sari, dkk. (2016) membuktikan bahwa analisis perbandingan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah membuktikan melalui analisis kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi didukung oleh transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan merupakan sumber dana utama pemerintah daerah dalam mendukung tingkat kemandirian daerah, selain Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen dari Dana Perimbangan yang sering disebut sebagai dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan DAK merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional, sehingga dalam pemenuhan dana bantuan yang diperoleh dari DAU dan DAK dapat memenuhi kebutuhan daerah dan memacu tingkat Pendapatan Asli Daerah, karena tersedianya prasarana mendukung dalam memacu tingkat kemandirian daerah juga dapat mengatasi ketimpangan ekonomi antar daerah yang terjadi. Dalam penelitian Anwar, dkk. (2016) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja Modal memiliki hubungan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran pada sektor publik untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal merupakan jenis pengeluaran yang dominan sebagian besar daerah yang berhubungan erat dengan pembangunan publik. Belanja modal meliputi tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset lainnya. Keseluruhan belanja modal tersebut merupakan infrastruktur yang digunakan oleh daerah. Penelitian Dewi (2017) menyatakan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena belanja modal kurang produktif, dan hasil alokasi belanja modal belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek dalam pembangunan infrastruktur.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga kemandirian fiskal daerah melalui proxi Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap total pendapatan daerah dan Rasio Belanja Modal (BM) terhadap total belanja daerah tidak berpengaruh signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2011-2015.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melanjutkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel merupakan gabungan antara data individu (*cross section*) dan data runtun waktu (*time series*). Penggunaan metode panel dikarenakan mampu melihat karakteristik individu. Selain itu bisa menangkap perbedaan antar individu, data panel juga mampu membandingkan kondisi individu tersebut pada suatu periode dengan periode lainnya. Penelitian dilakukan di 14 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, yang terdiri dari: (1) Kab. Lampung Barat; (2) Kab. Lampung Selatan; (3) Kab. Lampung Tengah; (4) Kab. Lampung Utara; (5) Kab. Lampung Timur; (6) Kab. Tanggamus; (7) Kab. Tulang Bawang; (8) Kab. Way Kanan; (9) Kota Bandar Lampung; (10) Kota Metro; (11) Kab. Pesawaran; (12) Kab. Pringsewu; (13) Kab. Mesuji; (14) Kab. Tulang Bawang Barat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini secara umum merupakan data publikasi dari daerah dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai PDRB kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, publikasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat (djpk.depkeu.go.id) mengenai realisasi APBD kabupaten/kota se-Provinsi

Lampung, serta berbagai sumber lainnya yang relevan seperti jurnal, publikasi ilmiah di internet, buku, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang diperoleh dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam (%).

Dirumuskan sebagai berikut:

$$PE = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{PDRB_{t-1}} \times 100 \%$$

(Sumber Data: Badan Pusat Statistik)

2. Rasio PAD adalah rasio mengukur besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan total pendapatan daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 dan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 6 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah (APBD)}} \times 100 \%$$

(Sumber Data: DJPK Kemenkeu RI)

3. Rasio DAU adalah rasio mengukur besar kecilnya pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan total pendapatan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN.

Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio DAU} = \frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah (APBD)}} \times 100 \%$$

(Sumber Data: DJPK Kemenkeu RI)

4. Rasio DAK adalah mengukur besar kecilnya pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan total pendapatan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dalam peraturan pemerintah berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah

dan sesuai dengan prioritas nasional dengan menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang di transfer ke wilyah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD).

Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio DAK} = \frac{\text{Realisasi DAK}}{\text{Total Pendapatan Daerah (APBD)}} \times 100 \%$$

(Sumber Data: DJPK Kemenkeu RI)

5. Rasio Belanja Modal (BM) adalah mengukur besar kecilnya Belanja Modal dibandingkan total belanja daerah, dalam hal ini mengukur seberapa jauh kebijakan pemerintah dalam penganggaran yang berorientasi kepada manfaat jangka panjang atau investasi yang berhubungan erat dengan pembangunan publik. Belanja modal adalah Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Belanja modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset lainnya.

Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Belanja Daerah (APBD)}} \times 100 \%$$

(Sumber Data: DJPK Kemenkeu RI)

Tabel 7. Nama Variabel, Simbol, Satuan Pengukuran dan Sumber Data

No.	Nama Variabel	Simbol	Satuan Pengukuran	Sumber Data
1.	Pertumbuhan Ekonomi	PE	%	BPS
2.	Rasio Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD	%	DJPK
3.	Rasio Dana Alokasi Umum	Rasio DAU	%	DJPK
4.	Rasio Dana Alokasi Khusus	Rasio DAK	%	DJBK
5.	Rasio Belanja Modal	Rasio BM	%	DJBK

C. Model dan Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan model analisis regresi data panel. Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Model fungsi persamaan metode panel dalam penelitian ini adalah:

$$PE = f(PAD_{it}, DAU_{it}, DAK_{it}, BM_{it})$$

Penggunaan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Dana Alokasi Umum (DAU), Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Rasio Belanja Modal (BM) terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam model struktural, model dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 BM_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

PE	= Pertumbuhan Ekonomi (%)
Rasio PAD	= Rasio Pendapatan Asli Daerah (%)
Rasio DAU	= Rasio Dana Alokasi Umum (%)
Rasio DAK	= Rasio Dana Alokasi Khusus (%)
Rasio BM	= Rasio Belanja Modal (%)
β_0	= Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien variabel bebas
i	= Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
t	= Waktu
ϵ_{it}	= Variabel gangguan / <i>Error Correction Term</i>

D. Prosedur Analisis Data

1. Regresi Data Panel

Menurut Widarjono (2013) secara umum dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan *intersep* dan *slope* koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang *intersep*, koefisien *slope* dan variabel gangguannya. Ada beberapa kemungkinan asumsi:

- 1) Diasumsikan *intersep* dan *slope* adalah tetap sepanjang waktu dan individu (perusahaan) dan perbedaan *intersep* dan *slope* dijelaskan oleh variabel gangguan.
- 2) Diasumsikan *slope* adalah tetap tetapi *intersep* berbeda antar individu.
- 3) Diasumsikan *slope* tetap tetapi *intersep* berbeda baik antar waktu maupun antar individu.
- 4) Diasumsikan *intersep* dan *slope* berbeda antar individu.
- 5) Diasumsikan *intersep* dan *slope* berbeda antar waktu dan antar individu.

Namun demikian ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu tiga pendekatan yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

1.1. Pendekatan *Common Effect*

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect*. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu (Widarjono, 2013). Model dari pendekatan ini adalah sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 BM_{it} + e_{it}$$

1.2. Pendekatan *Fixed Effect*

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep di dalam persamaan dikenal dengan model regresi *Fixed Effect*. Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep, namun intersepanya sama antar waktu. Disamping itu, model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model estimasi ini seringkali disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) (Widarjono, 2013). Model *Fixed Effect* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{1it} + \beta_2 DAU_{2it} + \beta_3 DAK_{3it} + \beta_4 BM_{4it} + \beta_5 D_{1i} + \beta_6 D_{2i} + \beta_7 D_{3i} + \beta_8 D_{4i} + \beta_9 D_{5i} + \beta_{10} D_{6i} + \beta_{11} D_{7i} + \beta_{12} D_{8i} + \beta_{13} D_{9i} + \beta_{14} D_{10i} + \beta_{15} D_{11i} + \beta_{16} D_{12i} + \beta_{17} D_{13i} + e_{it}$$

dimana variabel di $D_{1i} = 1$ untuk objek pertama dan 0 untuk objek lainnya. variabel $D_{2i} = 1$ untuk objek kedua dan 0 untuk objek lainnya. variabel $D_{3i} = 1$ untuk objek ketiga dan 0 untuk objek lainnya. variabel $D_{4i} = 1$ untuk objek keempat dan 0 untuk objek lainnya. Variabel semu $D_{5i} = 1$ untuk objek kelima dan 0 untuk objek lainnya dan seterusnya.

1.3. Pendekatan *Random Effect*

Memasukan variabel *dummy* dalam *Fixed Effect Model* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter (Widarjono, 2013). Masalah ini bisa diatasi dengan variabel gangguan (*error terms*) dikenal sebagai metode *Random Effect Model*. Didalam model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Bentuk *Random Effect Model* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + PAD_{it} + DAU_{it} + DAK_{it} + BM_{it} + e_{it}$$

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal ini β_{0i} tidak lagi tetap, tetapi bersifat *random* sehingga bisa dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\beta_{0i} = \bar{\beta}_0 + \mu_i \text{ dimana } i = 1, \dots, n$$

$\bar{\beta}_0$ adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep populasi dan μ_i adalah variabel gangguan yang bersifat *random* yang menjelaskan

adanya perbedaan perilaku perusahaan secara individu. Dalam hal ini variabel gangguan μ_i mempunyai karakteristik sebagai berikut:

$$E(\mu_i) = 0 \text{ dan } \text{var}(\mu_i) = \sigma_{\mu}^2$$

$$\text{Sehingga } E(\beta_{0i}) = \bar{\beta}_0 \text{ dan } \text{var}(\beta_{0i}) = \sigma_{\mu}^2$$

Kedua persamaan disubstitusikan, maka menghasilkan persamaan baru yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y_{it} &= \bar{\beta}_0 + \mu_i + PAD_{it} + DAU_{it} + DAK_{3it} + BM_{it} + e_{it} \\ &= \bar{\beta}_0 + PAD_{it} + DAU_{it} + DAK_{it} + \beta_4 X_{4it} + (e_{it} + \mu_i) \\ &= \bar{\beta}_0 + PAD_{it} + DAU_{it} + DAK_{it} + BM_{it} + v_{it} \end{aligned}$$

$$\text{Dimana } v_{it} = e_{it} + \mu_i$$

Persamaan dari variabel ini merupakan metode *Random Effect Model*. Nama metode *Random Effect Model* berasal dari pengertian bahwa variabel gangguan v_{it} terdiri dari dua komponen yaitu variabel gangguan secara menyeluruh ε_{it} yaitu kombinasi *time series* dan *cross section* dan variabel gangguan secara individu tetapi tetap antar waktu.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk memilih model mana yang paling tepat digunakan untuk pengolahan data panel, maka terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain:

2.1. Uji Chow adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* (Widarjono, 2013). adapun Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagai berikut :

- $H_0 = \text{Model Common Effect Model}$
- $H_1 = \text{Model Fixed Effect Model}$

Keterangan:

H_0 ditolak jika hasil hipotesis *P-value* lebih kecil taraf nyata (*alpha*). Sebaliknya, H_0 diterima jika *P-value* lebih besar dari taraf nyata (*alpha*). Nilai F-tabel menggunakan taraf nyata (*alpha*) sebesar 5%. Kriteria pengujiannya uji hipotesis sebagai berikut:

- Bila H_0 ditolak, jika Uji Chow $>$ F-tabel, artinya bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat daripada *Common Effect Model*.
- Bila H_0 diterima, jika Uji Chow $<$ F-tabel, artinya bahwa *Common Effect Model* lebih tepat daripada *Fixed Effect Model*.

Setelah dilakukan uji Chow pemilihan model terbaik antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* maka selanjutnya dilanjutkan uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

2.2. Uji Hausman adalah pengujian statistik sebagai dasar membandingkan dalam memilih apakah menggunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* (Gujarati dan Porter, 2012). Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

- $H_0 = \text{Model Random Effect Model}$
- $H_1 = \text{Model Fixed Effect Model}$

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika kita menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah *Random Effect Model* sedangkan sebaliknya bila kita gagal menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*.

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Widarjono (2013) Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Squared*) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas, dan Normalitas. Walaupun demikian tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier (*panel*) dengan pendekatan OLS.

- 1) Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linier. Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya.
- 2) Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat *Best Linier Unbias Estimator* (BLUE) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.

- 3) Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (*cross section* atau *panel*) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti.
- 4) Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas dan disesuaikan untuk persamaan regresi apabila persamaan regresi adalah *Random Effect*, maka tidak perlu dilakukan uji klasik multikolinieritas. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan menggunakan GLS (*Generalized Least Square*) bersifat *random*. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan *Common Effect* atau *Fixed Effect* karena lebih pendekatan OLS (*Ordinary Least Squared*) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik (Gujarati dan Porter, 2009).
- 5) Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada model regresi data panel, uji asumsi klasik dalam regresi linier hanya heteroskedastisitas saja. Berikut pemaparan penjelasan uji heteroskedastisitas.

3.1. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Imam Ghozali, 2013: 139). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser (Gujarati, 2003) yang dikutip oleh Imam Ghozali (2013: 142). Pada uji Glejser, nilai residual absolut diregresi dengan variabel independen.

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan apabila variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka indikasi terjadi homoskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

- a. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka terjadi homoskedastisitas.
- b. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

E. Uji Hipotesis

1. Uji t- Statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013: 178). Uji t dipakai untuk melihat signifikansi dari pengaruh independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan.

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

1) Perumusan Hipotesis

H_0 : $\beta = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a : $\beta > 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut perumusan hipotesis untuk variabel-variabel dalam penelitian:

- H_0 : $\beta_1 = 0$: Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

- $H_a : \beta_1 > 0$: Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi.
- $H_0 : \beta_2 = 0$: Rasio Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- $H_a : \beta_2 > 0$: Rasio Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi.
- $H_0 : \beta_3 = 0$: Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- $H_a : \beta_3 > 0$: Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi.
- $H_0 : \beta_4 = 0$: Rasio Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- $H_a : \beta_4 > 0$: Rasio Belanja Modal (BM) berpengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi.

Dengan tingkat signifikansi (α), yaitu sebesar 5%.

- 2) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan H_0 , yakni dengan melihat nilai signifikan:

Jika $P\text{-value} < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima.

Jika $P\text{-value} > 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak.

- 3) Pengambilan keputusan

Uji t dilakukan dengan membandingkan p-value t-hitung yang dihasilkan oleh masing – masing variabel independen dalam persamaan regresi di atas dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik

kesimpulan hipotesis diatas yaitu jika $p\text{-value}$ t hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak atau H_a diterima.

2. Uji F- Statistik

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013: 177). Langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

1) Perumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_i = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara F- statistik terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_i \neq 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara F- statistik terhadap variabel dependen.

Berikut perumusan masalah untuk variabel-variabel dalam penelitian:

- $H_{05} = 0$: Rasio PAD, Rasio DAU, Rasio DAK, dan Rasio BM secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- $H_{a5} \neq 0$: Rasio PAD, Rasio DAU, Rasio DAK, dan Rasio BM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan tingkat signifikansi, yaitu sebesar 5 %.

2) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan H_0 , yakni dengan melihat nilai signifikan:

Jika $P\text{-value} < 0,05$ maka H_0 ditolak.

Jika $P\text{-value} > 0,05$ maka H_0 diterima.

3) Pengambilan keputusan

Uji F-statistik dilakukan dengan membandingkan *P-value* F-hitung yang dihasilkan dari model regresi dengan derajat signifikansinya (α) yaitu 0,05.

Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesis adalah jika *P-value* F- hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak atau H_a diterima.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Gujarati dan Porter (2012: 97) besarnya R^2 dikenal sebagai koefisien determinasi (sampel) yang merupakan ukuran paling umum digunakan untuk mengukur *goodness of fit* dari sebuah garis regresi. Nilai tersebut melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan terhadap variabel dependen, dimana nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Koefisien determinasi berkisar antara nol (0) sampai dengan satu (1), dimana disimbolkan dengan $0 \leq R^2 \leq 1$. Hal ini berarti bahwa bila $R^2 = 0$, maka menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel-variabel independen variabel terhadap dependen. Semakin kecil R^2 mendekati 0, maka dapat dikatakan semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel-variabel dependen. Sebaliknya apabila R^2 semakin mendekati 1, maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel-variabel dependen.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat kemandirian fiskal 13 kabupaten/kota masih berpola hubungan instruktif, hal ini menunjukkan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Hanya Kota Bandar Lampung yang berada di posisi konsultatif. Hal ini menunjukkan campur tangan pemerintah pusat dalam hal keuangan sudah mulai berkurang karena Kota Bandar Lampung lebih mampu melaksanakan otonomi.
2. Kemandirian fiskal yang diwakili oleh Rasio PAD, Rasio DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2011-2015, sedangkan Rasio DAK dan Rasio Belanja Modal (BM) tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
3. Berdasarkan nilai karakteristik individu *Random Effect* terhadap 8 (enam) kabupaten/kota yaitu: Kab. Tulang Bawang, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, Kab. Tulang Bawang, Kab. Mesuji, Kab.

Pesawaran, Kab. Lampung Selatan dan Kab. Lampung Selatan yang memiliki nilai karakteristik individu *Random Effect* negatif. sedangkan 6 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki karakteristik individu *Random Effect* positif terdiri dari Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Barat, Kota Metro, Kab. Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kab. Tulang Bawang Barat.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan berikut ini diajukan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Diintensifikasikan dalam arti operasional pemungutannya pengawasan, tertib administrasi dan mengupayakan wajib pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak, serta melakukan ekstensifikasi dengan cara mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak. sehingga peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.
2. Pemerintah pusat meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui peningkatan yang lebih sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah, dengan adanya peningkatan penerimaan daerah membantu PAD membiayai besarnya belanja daerah dalam memenuhi dan membangun potensi-potensi daerah, sehingga kedepannya mampu membiayai diri sendiri secara mandiri dalam wujud kemandirian fiskal membiayai pengeluaran daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

3. Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi DAK tujuannya adalah untuk meningkatkan fasilitas khusus seperti infrastruktur jalan dan irigasi dll, sehingga mendukung dan memperlancar proses berjalannya peningkatan perekonomian suatu daerah yang berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi.
4. Pengalokasian belanja pemerintah di 14 kabupaten/kota Provinsi Lampung seharusnya dapat menyeimbangkan kebutuhan antar belanja daerah, seperti belanja modal seharusnya lebih ditingkatkan, sehingga pembangunan infrastruktur publik dapat terbangun, selain itu dalam mengalokasikan dana belanja modal perlu dilakukan kebijakan anggaran secara efektif dan efisien dengan tepat sasaran, sehingga dana yang dialokasikan dapat lebih produktif dalam meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerah maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Penerbit BPF. Yogyakarta.
- Adll, Shahid & Mumtaz Anwar. 2015. Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth: The Case of Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, Vol. 35, No. 1: 91-107.
- Amagoh, Francis & Aloysius Ajab Amin. 2012. An Eximination of the Impacts of Fiscal Decentralization on Economic Growth. *International Journal of Business Administration*, Vol. 3, No. 6: 72-81.
- Anwar, Ervina., Anderson K, dan George K. 2014. Analisis Kemandirian Fiskal Tahun 2010-2012 Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Bersekala Efisiensi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi. Manado*.
- Anwar, L, M., Sutomo, W, P, dan Jacline I,S. 2016. Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Ilmu Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado*. Vol. 16 No. 2.
- Case, Karl E dan Ray. C Fair. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, Edisi Kedelapan Jilid 1. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Laporan dan Realisasi APBD, Tahun 2011-2015.
www.djpk.depkeu.go.id.
<http://www.bps.go.id/lampung>.
- Dewi, N.W.R dan I Dewa, G.D.S. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akutansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana. Bali*. Vol. 7, No. 3: 1745-1773.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

- Fadli, Faisal. 2014. Analysis of Direct and Indirect Effect of Fiscal Decentralization and Regional Disparity: Case Study Provinces in East and West Indonesia Year 2006-2012. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 5, No. 18: 45-55.
- Freinkman, L & Plekhanov, A. 2009. *Fiscal Decentralization in Rentier Regions: Evidence from Russia*. World Development, Vol. 37, No.2.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- _____ and Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrika 5th Edition*. McGraw- Hill: New York.
- _____ and Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Gunantara, Putu Candra dan A.A.N.B. Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. *E-Jurnal Akutansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana. Bali*. Vol. 7, No. 3: 529-546.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21*, edisi 7. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPPN, Yogyakarta.
- _____. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi-4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- _____. dan M. Syam Kusufi. 2012. *Akutansi Sektor Publik: Akutansi Keuangan Daerah*, Edisi ke-4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hamzah, Muhammad Zilal and Abd. Ghafar B. Ismail. 2006. *Fiscal Decentralization and Economic Growth Nexus: Evidence from Province-level Cross-section Data for Indonesia*. *Review of Islamic Economics*, Vol.10, No. 2: 135-152.
- Idris, Amiruddin. 2016. *Ekonomi Publik*. Edisi Pertama. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.

- Jhinghan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*, Edisi ke-6. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1995. *Ekonomi Publik*, Edisi ke-3. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*, Edisi ke-4. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi. Fakultas Politenik Negeri Padang. Padang*. Vol 5, No.2.
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia*, Edisi ketiga, Jilid-1. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Nordiaman, Deddi. 2016. *Akutansi Sektor Publik*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Nwaoha, W. C., Onwuka, O.O & Chukwu A.E. 2017. *Effect of Aggregated and Disaggregated Public Spending Nigerian Economy (1980-2015)*. *International Journal of Economics and Financial Research*, Vol. 3, No. 4 ISSN(e): 2411-9407, ISSN(p): 2413-8533: 44-53.
- Paseki, Meilen Greri., Amran N, dan Patrick W. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Ilmu Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado*. Vol 14 No. 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan.
- Permanasari, Windha Amiga. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2009-2011). *Artikel Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Prasetyo, Ferry. 2012. *Modul Ekonomi Publik : Bagian V Teori Pengeluaran Pemerintah*. Penerbit Universitas Brawijaya. Malang.

- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Edisi Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sari, N.G., Paulus K, dan Tri, O, R. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi Berkala Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi. Manado.*
- Sukirno, Sadono. 1996. *Makro Ekonomi*, Edisi ke-2. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- _____. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi ke-3. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2013. *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Sidik, Machfud., Djoko Hidayanto, Tjip Ismail, Kadjatmiko, Arlen T. Pakpahan & Ardriansah. 2004. *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Simanjuntak, Robert A. 2002. *Implikasi Fiskal Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Usahawan, No.4 April.
- Tahar, Afrizal dan Maulida Zakhiya. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Vol. 12 No. 1: 88-99.
- Tulus T.H. Tambunan. 2009. *UMKM di Indonesia*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Universitas Lampung. 2016. Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.